



**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN PNS  
TAHUN 2020**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**TAHUN 2020**

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 18 Juli Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian;
- g. Peraturan bersama Kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional organisasi, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Lebih lanjut sistem informasi mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial. Kegiatan pengelolaan informasi suatu organisasi

dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan data kepada manajemen. Penyediaan informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya setiap fungsi manajemen dan pelayanan organisasi. Informasi yang dibutuhkan adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Informasi dapat berupa peristiwa ataupun suatu rekaman kegiatan organisasi yang tersimpan dalam sebuah media baik berupa naskah, dokumen, peta, quisener ataupun dalam bentuk lain dapat ditemukan dalam arsip dan dokumen. Informasi tersebut termasuk didalamnya adalah informasi kepegawaian yang tersimpan dalam Arsip Dokumen Kepegawaian yang tercipta dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Informasi kepegawaian yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah harus dikelola secara baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi sebagaimana amanat UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Selain itu juga guna menunjang tugas penyelenggaraan manajemen kepegawaian

Sesuai UU Nomor 43 tahun 2009 menyebutkan bahwa arsip rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Manajemen PNS Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang aktual dan akurat tentang data di bidang kepegawaian membuat Sistem Informai Kepegawaian untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.

Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah dirintis sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan pewujudan sistem merit pada peningkatan manajemen SDM. Informasi kepegawaian yang dikelola oleh BKD diantaranya adalah Informasi kepegawaian

yang terekam dalam Arsip dokumen Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau disebut sebagai tata naskah kepegawaian PNS.

Sesuai dengan PERKA BKN Nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Tata Naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS aktif dan upaya peningkatan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil, pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS disimpan dalam bentuk dokumen fisik maupun image document, sehingga pengelolaan tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Hal ini berarti BKD Prov Jawa Tengah selaku pengelola informasi kepegawaian dalam dokumen kepegawaian PNS harus bisa melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien. Termasuk didalam pengelolaan ini adalah terhadap arsip dokumen kepegawaian fisik dan Digital (*image dokumen*) sebagaimana dalam Perka BKN tersebut. Pengelolaan arsip dokumen kepegawaian PNS ini tidak terlepas dari berkas administrasi kepegawaian dan dokumen proses untuk mendapatkan produk kepegawaian itu sendiri.

Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Sistem Aplikasi e-File yang merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola dokumen kepegawaian tekstual dan digital seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan digunakan E-File ini untuk proses kepegawaian secara *paperless*. Aplikasi e-File BKD Provinsi Jawa Tengah mempunyai misi seluruh proses kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara paperless.

Pada tahun 2015 BKD Provinsi Jawa Tengah melakukan Sharing Aplikasi e-File kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota dapat menyamakan pengelolaan dokumen kepegawaian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. diharapkan seluruh dokumen kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota akan sinkron dengan aplikasi DMS (Document Management System) BKN yang sudah diakomodir oleh Aplikasi e-File. Karena BKD Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi e-File tersebut berdasarkan pedoman dari BKN.

Hasil assessment keamanan sistem aplikasi Simpeg oleh Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) mengharuskan aplikasi-aplikasi pada Simpeg untuk ditenahi dengan penambahan pada fitur-fitur keamanan. Sehingga ke depan

aplikasi pada simpeg akan lebih aman dan bisa memproteksi diri dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan sebuah mekanisme yang dapat mengampu seluruh perbedaan dan permasalahan yang ada dalam hal pengelolaan dokumen kepegawaian digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam melaksanakan penerapan pengelolaan dokumen digital, maka perlu dilakukan pengembangan aplikasi e-file yang lebih kompatibel guna mewujudkan tercapainya integrasi sistem dokumen digital PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan kompatibel didukung dengan dokumen fisik yang lengkap, akuntabel dan aman dari serangan pihak –pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud

Kegiatan pengelolaan Dokumen Kepegawaian PNS melalui Pengembangan Aplikasi e-File dan pengelolaan dokumen kepegawaian dimaksudkan untuk mengelola seluruh dokumen kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang optimal, sinkron dan terintegrasi dengan Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

### 2. Tujuan

- a. Terselenggaranya kelancaran pengelolaan Dokumentasi data PNS se-Jawa Tengah yang bersumber dari Simpeg atau data SAPK BKN untuk diolah menjadi data pada aplikasi e-File Kepegawaian se-Jawa Tengah.
- b. Tercapainya kesepahaman PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk mengelola data dan dokumen digital PNS se-Jawa Tengah secara terintegrasi.
- c. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data dan dokumen kepegawaian PNS antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan *up-to-date*.
- d. Terlaksananya proses administrasi pelayanan kepegawaian secara *paperless* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sistem kearsipan yang handal.
- e. Terkelolanya dokumen Kepegawaian PNS Prov Jateng dan Kabupaten/kota menjadi berdaya guna.

### C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

1. Pengembangan aplikasi E-File;
2. Sinkronisasi data dan inventarisasi kebutuhan dan permasalahan layanan kepegawaian melalui inventarisasi secara langsung ke Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan arsip Dokumen kepegawaian PNS fisik.

### D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Pengembangan Aplikasi e-File;
2. Pembangunan dan Implementasi IT Security Untuk Menjamin Keamanan Aplikasi dan Dokumen Data Kepegawaian;
3. Dokumen Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota, dan Pengelola kepegawaian Kabupaten/Kota sejumlah 35 Kabupaten/Kota.

### E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Data kepegawaian Kepegawaian se-Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

### F. JADWAL KEGIATAN

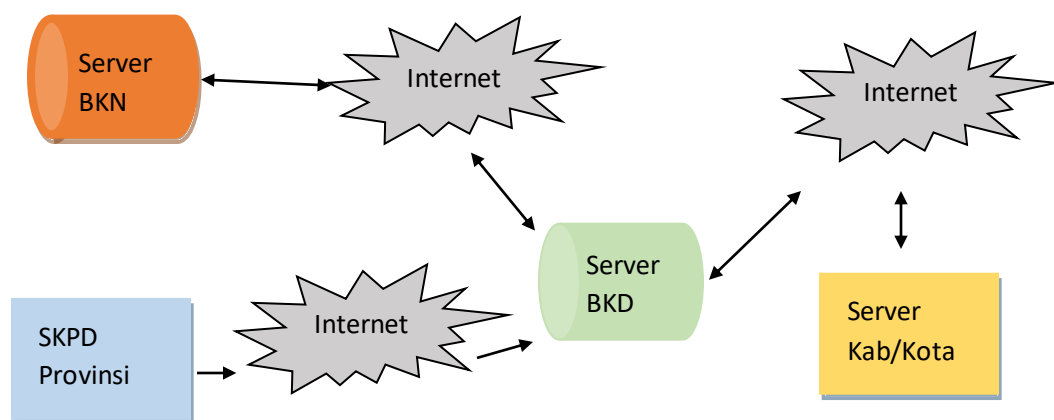
NO	KEGIATAN	TAHUN 2020											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK												
2	Konsultasi/Koordinasi												
3	Belanja Pengembangan Aplikasi												
4	Pengelolaan dan perawatan fisik dokumen												

### G. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pengembangan e-File Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah adalah sebuah mekanisme *updating* data dokumen Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah selaras dengan pengelolaan dokumen Kepegawaian PNS. Adapun dalam pelaksanaannya dengan dukungan:

1. Pengembangan Aplikasi e-File Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan memanfaatkan data Simpeg atau data akhir SAPK BKN sebagai sumber data dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- Identifikasi kebutuhan;
- Penyusunan hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak;
- Dukungan interkoneksi dan interoperabilitas, mampu berintegrasi dan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.
- Penerapan dan pemberlakuan uji coba sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik;
- Penentuan tim yang akan mengerjakan, termasuk tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- Penyediaan fasilitas terkait yang dibutuhkan selama kegiatan;
- Penyusunan tahapan pekerjaan dan hasil yang didapat dari tiap tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah merujuk kepada metode dan teori perancangan dan pembangunan suatu aplikasi;



*Bagan hasil pengembangan Aplikasi e-File Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah*

2. Pembangunan dan Implementasi IT Security Untuk Menjamin Keamanan Aplikasi dan Dokumen Data Kepegawaian;
3. Terinventarisasinya sumber daya, permasalahan dan kebutuhan pengembangan, dan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke Kabupaten/Kota.
4. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah dengan rincian:
  - a. Pengelolaan dokumen digital sebanyak 352.500 dokumen;

- b. Pemberkasan Dokumen Kepegawaian Fisik 30.000 kedalam Berkas PNS Prov Jateng;
  - c. Penyusutan Dokumen kepegawaian nominatif inaktif Pensiun 2000 Berkas.
5. Perawatan Dokumen Kepgawaian PNS Prov Jateng.

## **H. ANGGARAN**

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Dokumentasi Kepegawaian PNS Tahun 2020 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Pengembangan E-File dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020.

Semarang, Agustus 2019  
KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN  
BKD PROVINSI JAWA TENGAH

**UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP 19700113 198903 2 002